

- ABSTRAK:

- Bahwa pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkannya perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pengadaan Barang/ Jasa karena Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No.46 Tahun 2025; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Maksud dan Tujuan Kode Etik Pengadaan Barang/ Jasa, diatur juga tentang Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Sekretariat, Pemeriksaan Dan Keputusan, Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi, Sanksi.
- CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.
 - Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/ Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 18 Halaman.